



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

2026

# RENCANA KERJA

INSPEKTORAT DAERAH



JALAN ADE IRMA, KOTA PALEMBANG



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 dapat disusun dan terselesaikan. Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 ini merupakan manifestasi pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja sebagai dokumen yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2026 dan untuk mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Kami berharap Renja ini dapat menjadi gambaran pelaksanaan tugas-tugas pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Kami juga menyadari bahwa Renja ini masih banyak yang perlu disempurnakan, sehingga diharapkan masukan dan saran konstruktif dari semua pihak. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renja ini.

Palembang, 2 September 2025

INSPEKTUR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

**Dr. H. KURNIAWAN, AP.,M.Si., CGCAE**  
Pembina Utama Madya (IV.d)  
NIP. 197506171995011001

## DAFTAR ISI

### Halaman

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.3.1. Maksud .....	4
1.3.2. Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	6
2.1.1 Analisa dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Tahun Lalu.....	6
2.1.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	7
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	
2.3.1. Isu Aktual .....	9
2.3.2. Permasalahan dan hambatan.....	11
2.3.3. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah .....	12
2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD.....	14
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	14
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional.....	16
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.....	17
3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2023 .....	23
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024 .....	27
BAB V PENUTUP.....	28

## DAFTAR TABEL

### **Tabel 2.2**

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2024 Provinsi Sumatera Selatan.....29

### **Tabel 2.4**

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....36

### **Tabel 2.5**

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Provinsi Sumatera Selatan.....37

### **Tabel 2.6**

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan..... 47

### **Tabel 4.1**

Rumusan Rencana Program & Kegiatan SKPD Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027  
.....48

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam sistem akuntabilitas, perencanaan strategis merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja, perencanaan strategis dan laporan kinerja merupakan suatu rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Perencanaan strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program kegiatan maka perlu perencanaan kerja yang efektif dan efisien dalam skala Perangkat Daerah yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026. Penyusunan Rencana Kerja PD Tahun 2026 berpedoman pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahun 2026 dan mendasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 sebagai implementasi Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam penyusunan Renja setiap tahunnya. Renja ini memuat kebijakan, program, dan kegiatan berjalan, indikator kinerja, dan kelompok sasaran, serta menunjukkan prakiraan maju tahun berikutnya.

Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 juga untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang baik atau pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, transparan, bersih serta bertanggungjawab. Hal tersebut merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk

mewujudkan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan konstitusional Renja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah Pancasila dan UUD 1945 dan landasan operasional adalah ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain;

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
- 3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 56), Tambahan Lembaran Negara Nomor 6865);
- 4) Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2026-2045 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lembaran Negara Tahun. 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Nomor 4817);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 12) Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 13) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
- 14) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
- 15) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 2);
- 16) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 2);
- 17) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 46).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud penyusunan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah untuk menyusun suatu rencana pembangunan di bidang pembinaan dan pengawasan serta menetapkan indikator kinerjanya, yang pelaksanaannya akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun bersangkutan.

### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah mengintegrasikan sasaran yang ingin dicapai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan agar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.

### **1.4. Sistematika Penulisan.**

Renja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan.

#### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **BAB V. PENUTUP**

## LAMPIRAN

Tabel 2.1 Realisasi Keuangan dan Fisik

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 2.5 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

##### 2.1.1 Analisa dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Tahun Lalu

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, pada tahun 2024, Inspektorat Daerah Provinsi menetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis dengan 6 (enam) program, yang diimplementasikan dalam 61 (enam puluh satu) kegiatan sebagaimana tergambar dalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Tahun 2024. Capaian kinerja selama tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah :

**Tabel 2.1**  
**Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024	REALISASI	CAPAIAN
a	b	c	d	f	g
1	Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	1. Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal	91,8%	76,40%	83,22%
		2. Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan internal	78,5%	92,60%	117,9%
2	Meningkatnya Sistem pengendali intern pemerintah yang baik	1. Nilai Maturitas SPIP	3,12 (Level 3)	3,04 (Level 3)	97,4%
3	Terwujudnya penegakan integritas	1. Jumlah unit yang diusulkan	1 Unit	1 Unit	100%
		2. Indeks Integritas Daerah	65,7	60,63	92,2%
4	Meningkatnya Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Provinsi Sumatera Selatan	1. Nilai MCP (Monitoring Centre for Prevention) KPK RI	84 %	91,34%	108,7%
Rata-rata capaian kinerja (Sangat Baik)					100,08%

**Catatan : (5)=((4)/(3))\*100**

Pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 terdapat 4 (empat) sasaran dengan interpretasi nilai berhasil, secara keseluruhan pencapaian kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 dengan pencapaian kinerja sebesar **100,08 %**.

### **2.1.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.**

Secara lengkap capaian kinerja kegiatan, program dan Sasaran yang di atas dapat dijelaskan pada **Tabel 2.2** (terlampir).

#### **Aspek Keuangan**

Dalam mencapai Sasaran pada tahun 2024, pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan didukung dengan alokasi dana yang berasal dari alokasi dana APB

**Tabel 2.1  
Realisasi Fisik & Keuangan**

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Realisasi (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)
			<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>28.307.360.832</b>	<b>95,58</b>
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.700.000	99,41	46.425.000		100,00
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46.700.000	99,41	46.425.000	4 Laporan	100,00

	<b>ii</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>22.623.625.132</b>	<b>95,96</b>	<b>21.708.605.103</b>		<b>99,15</b>
	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.665.700.132	96,10	20.821.433.123	1544 Ob	99,36
	3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	642.925.000	91,48	588.141.980	11 Dokumen	91,67
	4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	315.000.000	94,93	299.030.000	12 Dokumen	100,00
	<b>iii</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0,00	0	0 OB	0,00
	<b>iv</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1.643.533.825</b>	<b>97,31</b>	<b>1.599.325.245</b>		<b>94,10</b>
	6	Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut kelengkapannya	97.000.000	94,02	91.200.000	97 Paket	100,00
	7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.358.185.000	98,14	1.332.882.840	80 Orang	100,00
	8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	188.348.825	93,04	175.242.405	45 Orang	100,00
	<b>v</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.673.819.475</b>	<b>99,14</b>	<b>1.659.429.794</b>		<b>100,00</b>
	9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	154.179.975	98,03	151.139.600	3 Paket	100,00
	10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	180.000.000	99,75	179.550.100	4 Paket	100,00
	11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	160.000.000	99,53	159.248.400	3 Paket	100,00
	12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150.000.000	100,00	149.999.080	4 Paket	100,00
	13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	95,33	28.599.000	21 Dokumen	100,00

	14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	999.639.500	99,13	990.893.614	96 Laporan	100,00
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	0,00	0	0	0,00
	<b>vi</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>724.950.000</b>	<b>96,61</b>	<b>700.350.000</b>		<b>100,00</b>
	15	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	650.000.000	96,22	625.400.000	1 Unit	100,00
	16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.950.000	100,00	74.950.000	0	100,00
	<b>vii</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>943.960.000</b>	<b>82,25</b>	<b>776.427.744</b>		<b>99,96</b>
	17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	85,97	8.596.500	1100 Benda Pos	96,42
	18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	498.960.000	67,35	336.063.994	60 Laporan	100,00
	19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	435.000.000	99,26	431.767.250	12 Laporan	100,00
	<b>viii</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>650.772.400</b>	<b>86,88</b>	<b>565.366.446</b>		<b>100,00</b>
	20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	427.272.400	80,01	341.866.446	20 Unit	100,00
	21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	223.500.000	66,66	223.500.000	6 Unit	100,00
<b>II</b>		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>3.956.716.056</b>	<b>95,85</b>	<b>3.792.426.945</b>		<b>100,00</b>
	<b>i</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>2.722.770.056</b>	<b>96,50</b>	<b>2.627.395.665</b>		<b>100,00</b>
	22	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.018.530.056	96,82	986.116.882	100 Laporan	100,00
	23	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	721.840.000	95,13	686.689.199	100 Laporan	100,00

	24	Reviu Laporan Kinerja	84.750.000	99,04	83.933.437	2 Laporan	100,00
	25	Reviu Laporan Keuangan	80.850.000	99,81	80.700.000	1 Laporan	100,00
	26	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	499.700.000	94,92	474.319.167	36 Laporan	100,00
	27	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	317.100.000	99,54	315.636.980	6 Dokumen	100,00
	<b>ii</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>1.233.946.000</b>	<b>94,42</b>	<b>1.165.031.280</b>		<b>100,00</b>
	28	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	0	0,00	0	0 Laporan	0,00
	29	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.233.946.000	94,42	1.165.031.280	100 Laporan	100,00
<b>III</b>		<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>1.002.990.368</b>	<b>96,35</b>	<b>966.421.627</b>		<b>100,00</b>
	<b>i</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>143.000.000</b>	<b>99,17</b>	<b>141.813.812</b>		<b>100,00</b>
	30	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	143.000.000	99,17	141.813.812	3 Rekomendasi	100,00
	<b>ii</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>859.990.368</b>	<b>95,89</b>	<b>824.607.815</b>		<b>100,00</b>
	31	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	276.700.200	97,96	271.061.528	41 Perangkat Daerah	100,00
	32	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	243.840.000	99,56	242.757.915	41 Perangkat Daerah	100,00
	33	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	149.240.168	88,65	132.306.482	4 Kegiatan	100,00

34	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	190.210.000	93,83	178.481.890	4 Perangkat Daerah	100,00
<b>Jumlah : 34 Sub kegiatan</b>		<b>33.267.067.256</b>	<b>95,63</b>	<b>31.814.777.904</b>		<b>99,42</b>

Dari tabel di atas diketahui bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 memperoleh anggaran dari APBD sebesar Rp.33.267.067.256,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.31.814.777.904,- atau 95,63 % dan capaian realisasi fisik sebesar 99,42 %

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya yang dilakukan untuk membantu Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa.

Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

Sedangkan Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan melakukan pengawasan sesuai dengan tahapan kegiatan :

- 1) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;

- 2) Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 3) Pelaksanaan program strategis nasional di daerah;
- 4) Berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
- 5) Pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut meliputi :

- 1) Pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan;
- 2) Pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- 3) Reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-waktu dari Perangkat Daerah;
- 4) Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- 5) Monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), bahwa LPPD disusun dengan pengumpulan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dan wajib diverifikasi atau divalidasi oleh Inspektorat Daerah. Sesuai dengan ketentuan tersebut Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu, Maturitas SPIP terintegrasi dan Kapabilitas APIP

Secara lengkap pencapaian kinerja pelayanan OPD Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di atas dapat dijelaskan pada **tabel 2.4** terlampir.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bertujuan untuk meyakinkan pelaksanaan urusan pemerintahan dapat mencapai tujuannya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta meningkatkan efektivitas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel mempunyai tugas membantu tugas Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi di bidang pengawasan yaitu sebagai pengendali internal manajemen yang harus dapat mengisi peran dengan memberikan peringatan dini terhadap potensi penyimpangan dan kecurangan yang terjadi yang disebabkan kelemahan sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu. Untuk mencapai hal tersebut, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang, yaitu pemerintah pusat mengawasi dan membina provinsi dan selanjutnya Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan.

APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

#### **2.3.1 Isu Aktual**

Adapun isu aktual pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang tertuang didalam Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu :

- 1) Optimalisasi fungsi dan peran Inspektorat yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan, yang diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu mendorong perangkat daerah untuk berinovasi.
- 2) Mendorong dan mempertahankan predikat opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
- 3) Mendorong peningkatan maturitas SPIP.
- 4) Mendorong kolaborasi antara Aparat Penegak Hukum (APH) dan APIP dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
- 5) Upaya deteksi dini dengan preventif untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan melalui evaluasi atau fasilitasi pemantauan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
- 6) Mendorong peningkatan predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- 7) Mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan pemeriksa BPK
- 8) Mendorong capaian program pemberantasan korupsi terintegrasi.
- 9) Meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (KAPIP).

### **2.3.2 Permasalahan dan hambatan**

Pelaksanaan pengawasan khususnya tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang berperan sebagai peluang dan kendala. Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh kepada pencapaian target kegiatan pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam proses pencapaian target tersebut terdapat permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan,

baik yang terkait dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana maupun Keuangan, yaitu :

- 1) Dari aspek sumber daya manusia, jumlah auditor maupun pejabat pengawas urusan pemerintahan daerah masih terbatas, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas kompetensi. Kondisi ini menyebabkan jangkauan pengawasan belum dapat mencakup seluruh perangkat daerah dan program strategis secara menyeluruh, serta kualitas hasil pengawasan belum maksimal sesuai dengan dinamika kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 2) Banyaknya temuan-temuan BPK, Inspektorat Daerah Provinsi, BPKP dan Inspektorat Jenderal Kementerian terkait yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan.
- 3) Keberadaan sarana dan prasarana yaitu kendaraan dinas beberapa diantaranya sudah mencapai usia lebih dari 10 tahun serta sarana yang juga diperlukan untuk menunjang pelaksanaan audit yaitu alat-alat ukur masih sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan kegiatan pengawasan, terutama peninjauan ke lokasi pemeriksaan di pedesaan (ke luar kota) masih sangat tergantung pada pihak auditan dan belum optimal. Masalah tersebut merupakan hal pokok yang dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan ke daerah.

### **2.3.3 Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.**

Pengawasan Intern dilaksanakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan prioritas sasaran-sasaran

Pemerintah Provinsi yang dijabarkan dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam rangka upaya peningkatan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, sekaligus untuk membantu dan mendorong agar tujuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat dicapai secara efektif, efisien, dan ekonomis. Sehubungan dengan hal tersebut, maka fokus pengawasan yang akan dilaksanakan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu :

- 1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam RPJMD dan/atau Rencana kerja pemerintah daerah dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk :
  - a) Pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau
  - b) Pemeriksaan Kinerja
- 2) Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari APBD
  - a) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah :
    - Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah
    - Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah
    - Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas

- plafon anggaran sementara
- Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD)
- b) Pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah
- Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah
  - Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah
  - Pengelolaan pembiayaan daerah
  - Pengelolaan manajemen kas dan persediaan
  - Pengelolaan barang milik daerah
- c) Reviu Laporan Keuangan
- d) Kegiatan Pengawasan Lainnya
- Probitas audit
  - Laporan Kinerja (reviu)
  - Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (reviu)
  - Perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu)
  - Perencanaan dan Penganggaran yang Berbasis Gender (PPRG)
  - Pengelolaan keuangan desa (pemeriksaan)
- 3) Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas
- a) Pengendalian Gratifikasi
  - b) Pelaksanaan survei penilaian integritas
  - c) Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi
  - d) Asistensi pembangunan reformasi dan birokrasi
  - e) Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi
  - f) Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi
  - g) Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar
  - h) Pemeriksaan investigatif

- i) Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang indikasi korupsi
  - j) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah.
- 4) Peningkatan Kapabilitas APIP
- a) Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3
  - b) Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
  - c) Penerapan manajemen resiko
  - d) Pendidikan professional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.

#### **2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD**

Pada Tahun Anggaran 2026 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp60.000.000.000,- (Enam Puluh Miliar Rupiah).

Secara lengkap Reviu Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel dapat dijelaskan pada **tabel 2.5** terlampir.

#### **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Pada tahun 2026 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat. Secara lengkap dapat dijelaskan pada **tabel 2.6** terlampir.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### **3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan prioritas pembangunan nasional.**

Dalam upaya mendukung perwujudan dan dalam menyinergikan perencanaan pemerintah pusat dan daerah, Asta Cita ke 7 dijabarkan ke dalam visi, misi dan program kepala daerah lima tahun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), berdasarkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 diatas, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sangat terkait dengan misi ke enam yaitu “Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Berbasis Digital, Menuju Pelayanan Publik Yang Berkualitas” yang dijabarkan dalam 8 (delapan) program sebagai berikut:

1. Membangun transformasi digital, pengembangan jaringan, keamanan pengembangan sumber daya manusia digital
2. Mendorong percepatan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)
3. Mendorong dan menjamin keterbukaan informasi publik terhadap kebebasan berekspresi, berkumpul dan berpendapat serta memperkuat pers dan masyarakat sipil
4. Mendukung pendidikan anti-korupsi dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi
5. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelayanan publik
6. Meningkatkan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan atau kelompok rentan yang mengalami permasalahan hukum
7. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap demokrasi melalui literasi publik

8. Meningkatkan reformasi birokrasi dalam rangka tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

### 3.2. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Untuk mewujudkan misi dan program-program prioritas pembangunan nasional dan daerah ditetapkan tujuan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu : "Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan", yang mendasari dan menjadi acuan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus menetapkan tujuan tersebut yaitu *good governance* sebagai landasan, Inspektorat memiliki peran strategis memastikan prinsip-prinsip tersebut berjalan melalui pengawasan. Transformasi digital memungkinkan proses pengawasan lebih cepat, akurat dan terintegrasi, hal ini mendukung tujuan Inspektorat untuk meningkatkan kualitas pengawasan dengan data yang valid dan terukur. Peningkatan kualitas pelayanan publik, Inspektorat mengawasi transformasi digital tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan, bebas dari penyimpangan, serta benar-benar berdampak pada kualitas pelayanan publik. dalam menetapkan untuk mencapai sasaran-sasaran, dimana Sasaran RPJMD yang berkaitan langsung tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah "Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas Birokrasi". Tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan lebih lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029**

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatkan kualitas dan kapabilitas birokrasi	<b>Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan</b>	Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah	<b>Nilai maturitas SPIP terintegrasi</b>
			1. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti 2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang

			ditindaklanjuti
		Meningkatnya peran APIP dalam tata kelola pemerintahan	Level Kapabilitas APIP
		Meningkatnya peran APIP dalam pencegahan korupsi	1. Nilai capaian pencegahan korupsi/MCSP KPK 2. Persentase capaian pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Adapun tujuan, sasaran dan target kinerja Inspektorat Daerah Sumatera Selatan dijabarkan dalam perjanjian kinerja Inspektur Tahun 2025 dibawah ini;

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi	Nilai	3,13
1.	Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah	1. Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti 2. Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	Persentase Persentase	78,6 % 75,2 %
2.	Meningkatnya peran APIP dalam tata kelola pemerintahan	1. Level Kapabilitas APIP	Level	Level 3
3.	Meningkatnya peran APIP dalam upaya pencegahan korupsi	1. Nilai capaian pencegahan korupsi/ MCSP KPK 2. Persentase capaian pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Nilai Persentase	84 75%

Dalam rangka memastikan tujuan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah, telah dirumuskan berbagai sasaran strategis yang masing-masing dilengkapi dengan indikator kinerja sebagai alat ukur pencapaiannya, yaitu:

## **Tujuan: Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan**

Tujuan ini diukur dengan indikator : Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi. Peningkatan nilai SPIP terintegrasi menjadi sasaran utama karena SPIP merupakan fondasi tata kelola yang baik. Semakin tinggi nilai maturitas, semakin baik pula integrasi pengendalian intern dengan manajemen risiko dan perencanaan kinerja. Penilaian dilakukan dengan menggunakan instrumen BPKP melalui asesmen yang mencakup lima elemen SPIP (lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan). Nilai diukur dalam skala 1-5.

### **Sasaran I : Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah**

Kepatuhan perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan menjadi tolok ukur efektivitas pengawasan. Semakin tinggi persentase tindak lanjut, semakin efektif peran Inspektorat dalam mendorong perbaikan tata Kelola pemerintahan.

Sasaran ini diukur dengan dua indikator, yaitu:

1. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut;

$$= \frac{\text{Jumlah rekomendasi pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti di tahun bersangkutan}}{\text{Jumlah akumulasi rekomendasi pemeriksaan APIP}} \times 100$$

2. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut;

$$= \frac{\text{Jumlah rekomendasi pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti di tahun bersangkutan}}{\text{Jumlah akumulasi rekomendasi pemeriksaan BPK}} \times 100$$

### **Sasaran II : Meningkatnya Peran APIP dalam Tata Kelola Pemerintahan**

Sasaran ini diukur dengan satu indikator yaitu;

1. Kapabilitas APIP menjadi tolok ukur kapasitas kelembagaan Inspektorat dalam menjalankan pengawasan berbasis risiko. Target level 3 hingga 2029 menunjukkan bahwa APIP telah mampu memberikan *assurance*, *consulting*, dan menjadi mitra strategis bagi

manajemen daerah. Penilaian menggunakan model kapabilitas APIP (IACM) yang ditetapkan BPKP, dengan rentang level 1–5.

### **Sasaran III : Meningkatkan Peran APIP dalam Pencegahan Korupsi**

Pencegahan korupsi menjadi mandat penting Inspektorat sebagai APIP. Pencapaian indikator ini menggambarkan efektivitas implementasi kebijakan pencegahan korupsi, pembangunan integritas, serta perbaikan tata kelola pelayanan publik, sasaran ini diukur dengan menggunakan dua indikator yaitu;

#### 1. Nilai Capaian Pencegahan Korupsi/MCSP KPK

Nilai Capaian Pencegahan Korupsi yang dimaksud adalah MCP (*Monitoring Center for Prevention*) Tahun 2024 dan pada Tahun 2025 diubah menjadi MCSP (*Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention*), Perbedaan utama antara MCP dan MCSP terletak pada cakupan, pendekatan, dan orientasinya, yaitu MCP fokus pada pencegahan korupsi berbasis kepatuhan terhadap prosedur dan sistem (administratif) sedangkan MCSP fokus pada pencegahan korupsi berbasis strategi dan dampak dengan pendekatan mengukur efektivitas upaya pencegahan, kolaborasi, dan perubahan sistem berdampak nyata terhadap integritas dan tata kelola. Area intervensi tidak lagi berbasis pada delapan area teknis, tetapi pada tema strategis dan lintas-sektor yang mendorong perubahan sistemik dan budaya antikorupsi, seperti:

1. Integritas dan budaya organisasi
2. Transparansi dan partisipasi publik
3. Digitalisasi tata kelola (*GovTech, e-governance*)
4. Penguatan pengawasan dan manajemen risiko
5. Kolaborasi antar pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat, dunia usaha)

Dari kompleksitas penilaian MCSP KPK, target indikator Nilai Capaian Pencegahan Korupsi dirasionalisasi agar memenuhi kriteria *achievable* (dapat dicapai) dan realistis pada kondisi sekarang. Pada tahun 2024 capaian MCP KPK RI sebesar 91,34, pada tahun 2025 target dirasionalisasi sebesar 84 dan meningkat di tahun-tahun berikutnya.

2. Persentase capaian pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Cara mengukur indikator ini yaitu dilakukan pembobotan kinerja berdasarkan tahapan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang dilakukan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, adapun bobot penilaian kinerja yaitu;

1. Tahap Pencanaan Pembangunan Zona Integritas 25%
2. Tahap Pembangunan / Implementasi Zona Integritas 50%
3. Tahap Evaluasi Tim Penilai Internal 75%
4. Hasil Evaluasi Predikat WBK dari Kementerian PAN RB RI 100%

Untuk kurun waktu 2025 – 2029, arah kebijakan dan strategi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan diarahkan dalam rangka mendukung pencapaian Misi ke enam RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera yaitu **“Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Berbasis Digital, Menuju Pelayanan Publik Yang Berkualitas”**, untuk melaksanakan kebijakan tersebut, strategi yang akan ditempuh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peran Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai *consultant dan quality assurance*. Pengawasan khususnya audit diarahkan pada skala prioritas. Selain itu dilaksanakan reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya. Dengan itu, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan memberikan keyakinan terbatas (*quality assurance*) kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Untuk menjalankan fungsi sebagai *consultant*, Inspektorat melaksanakan pendampingan pada kegiatan strategis SKPD. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu pelaksanaan audit kinerja dan audit ketaatan, reviu laporan Keuangan, reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA), reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), evaluasi internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pemantauan tindak lanjut hasil audit, pembangunan zona

integritas , penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, pemantauan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dan ASN, penyederhanaan proses administrasi, mengurangi birokrasi yang berlebihan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Dalam memastikan setiap tindakan pemerintahan dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan, sistem transparansi dan akuntabilitas akan diterapkan.

2. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan, kegiatan yang dilaksanakan yaitu Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), peningkatan kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), pendampingan penyusunan manajemen risiko dan rencana tindak pengendalian.

3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia

Pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan publik. Kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan seperti sektor swasta, masyarakat sipil, dan organisasi lintas sektoral akan diperkuat untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun cara mencapai tujuan dan sasaran meliputi Sasaran Kebijakan dan program Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan

<b>SASARAN</b>	<b>KEBIJAKAN</b>	<b>PROGRAM</b>
1.Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah	Pembinaan dan pengawasan mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan dan kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pengawasan Urusan	Program Penyelenggaraan Pengawasan

	Pemerintahan Daerah pada Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.	
2. Meningkatnya peran APIP dalam tata kelola pemerintahan	Asistensi dan Evaluasi Penerapan pengembangan SPIP pada SKPD pada level berkembang	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3. Meningkatnya peran APIP dalam pencegahan korupsi	Pemantauan Stranas MCSP KPK, Tindaklanjut aduan masyarakat.	Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

### 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2026

Program dan kegiatan yang akan diselenggarakan Tahun 2026 untuk sementara waktu masih mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025, karena Permendagri yang mengatur tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 belum terbit. Adapun program dan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, antara lain;

#### 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - Sub Kegiatan Pengumpulan Data Statistik Sektoral
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
  - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
  - Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD
- c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
  - Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
  - Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
  - Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan
  - Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
  - Sub Kegiatan Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Sub Kegiatan Penyedia Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
  - Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
  - Sub Kegiatan Penyedia Bahan Logistik Kantor
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor
  - Sub Kegiatan Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan
  - Sub Kegiatan Penyedia Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
- e) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

## **2) Program Penyelenggaraan Pengawasan :**

- a) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
- Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
  - Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
  - Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja
  - Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan
  - Sub Kegiatan Pengawasan Umum Dan Teknis Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal
  - Sub Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP
- b) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
- Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
  - Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

### **3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**

:

a) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

- Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
- Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

b) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi.

Sub Kegiatan Pedampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Pedampingan, Asistensi, Verifikasi Dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi
- Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi Dan Verifikasi Penegakan Integritas

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Secara lengkap Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat dijelaskan pada **tabel 4.1** terlampir.

## **BAB V** **P E N U T U P**

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Sumatera Selatan Tahun 2026 masih dimungkinkan mengalami perubahan dikarenakan masih akan melalui *desk* renja dan evaluasi TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026, selain itu sistematika penulisan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Sumatera Selatan Tahun 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat Daerah Sumatera Selatan Tahun 2026 yang memuat Indikator maupun penjabaran pagu anggaran secara rinci.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2026 ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TABEL 2.2**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA**

KEPMEN 900.1-2850 Tahun 2025		TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN (N-3)/(2023)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-1)/2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN			TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) / (2024)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2)/(2024)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) / 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	100%	100%	100%	98%	98		67%	67
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH LAPORAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA	4 LAPORAN	4 LAPORAN	3 LAPORAN	3 LAPORAN	100	2 LAPORAN	3 LAPORAN	100
PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	JUMLAH ORANG YANG MENERIMA GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1367 ORANG	3500 ORANG	1544 ORANG	1367 ORANG	100	-	657 ORANG	40
PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	JUMLAH LAPORAN ADMINISTRASI YANG DIBAYAR	312 OB	156 OB	312 OB	300 OB	96,15	30 OB	30 OB	100
PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	JUMLAH DOKUMEN HASIL PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	12 DOKUMEN	12 DOKUMEN	12 DOKUMEN	12 DOKUMEN	100	12 DOKUMEN	12 DOKUMEN	100
PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	JUMLAH TENAGA PENATAUSAHAAN DAN VERIFIKATOR YANG DIBAYAR	228 OB	96 OB	228 OB	228 OB	100	240 OB	240 OB	100
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	JUMLAH LAPORAN PENATAUSAHAAN BMD PADA SKPD	12 LAPORAN	12 LAPORAN	12 LAPORAN	12 LAPORAN	100	12 LAPORAN	12 LAPORAN	100
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	JUMLAH PAKAIAN DINAS DAN PERLENGKAPANNYA	220 STEL	200 STEL	220 STEL	220 STEL	100	-	-	-

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	JUMLAH PNS/APIP YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	120 ORANG	360 ORANG	80 ORANG	80 ORANG	97,87	47 ORANG	40 ORANG	62,91
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH BIMBINGAN TEKNIS YANG DILAKSANAKAN	-	-	-	-	-	2 PAKET	2 PAKET	100
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	JUMLAH UNIT KOMPONEN INSTALASI PENERANGAN KANTOR YANG TERSEDIA	2 PAKET	2 PAKET	2 PAKET	2 PAKET	100	2 PAKET	2 PAKET	100
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	JUMLAH ITEM ALAT TULIS KANTOR YANG TERSEDIA	60 JENIS	40 JENIS	60 JENIS	60 JENIS	100	-	-	-
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	JUMLAH PERALATAN DAN BAHAN PEMBERSIH YANG TERSEDIA	15 JENIS	15 JENIS	15 JENIS	15 JENIS	100	-	-	-
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	JUMLAH JENIS CETAKAN YANG TERSEDIA	30 JENIS	30 JENIS	30 JENIS	30 JENIS	100	4 PAKET	4 PAKET	100
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH BAHAN BACAAN DAN PERATURAN-UNDANGAN YANG TERSEDIA	2160 EKS	1742 EKS	2160 EKS	2160 EKS	100	21 DOKUMEN	17 DOKUMEN	100
PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	JUMLAH LAPORAN RAPAT DAN KOORDINASI	96 LAPORAN	413 KALI	150 KALI	-	0	87 LAPORAN	75 LAPORAN	100
PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	JUMLAH LAPORAN RAPAT DAN KOORDINASI	-	53 LAPORAN	96 LAPORAN	96 LAPORAN	100	-	-	-
DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	JUMLAH LAPORAN PENGELOLAAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL YANG DIKELOLA	3 LAPORAN	-	-	4 LAPORAN	100	2 DOKUMEN	2 DOKUMEN	100
PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU DINAS JABATAN	JUMLAH KENDARAAN DINAS JABATAN YANG TERSEDIA	1 UNIT	R2 = 1; R4 = 2	1 UNIT	1 UNIT	100	6 UNIT	6 UNIT	100
PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	JUMLAH KENDARAAN DINAS OPERASIONAL YANG TERSEDIA	3 UNIT	R4= 3 UNIT	R4= 3 UNIT	R4= 3 UNIT	100	-	-	-
PENGADAAN MEBEL	JUMLAH PENGADAAN MEBELEUR YANG TERSEDIA	4 JENIS	8 JENIS	14 JENIS	1 JENIS	100	-	-	-

PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	JUMLAH PENGADAAN PERALATAN KANTOR LAINNYA	6 JENIS	-	-	-	100	6 UNIT	6 UNIT	100
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	JUMLAH BENDA POS/MATERAI YANG TEREDIA	1000 MATERAI	748 MATERAI/BENDA POS	1000 MATERAI/BENDA POS	600 MATERAI/BENDA POS	100			100
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	JUMLAH REKENING YANG DIBAYARKAN	48 REKENING	12 LAPORAN	12 LAPORAN	12 LAPORAN	100	12 LAPORAN	12 LAPORAN	100
PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	JUMLAH JASA PELAYANAN UMUM YANG TERSEDIA	33 JASA	12 LAPORAN	12 LAPORAN	12 LAPORAN	100	12 LAPORAN	12 LAPORAN	100
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	JUMLAH KENDARAAN DINAS JABATAN YANG DIPELIHARA	17 KENDARAAN	14 KENDARAAN	17 KENDARAAN	16 KENDARAAN	100	17 KENDARAAN	17 KENDARAAN	100
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	JUMLAH KENDARAAN DINAS OPERASIONAL YANG DIPELIHARA	-	-	-	-	-	-	-	-
PEMELIHARAAN MEBEL	JUMLAH MEBEL KANTOR YANG DIPELIHARA	3 UNIT	3 UNIT	3 UNIT	3 UNIT	100	-	-	-
PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	JUMLAH PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR YANG DIPELIHARA	4 UNIT	4 UNIT	4 UNIT	4 UNIT	100	90 UNIT	0	0
PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	JUMLAH GEDUNG/KANTOR YANG DIPELIHARA	1 UNIT	1 UNIT	1 UNIT	1 UNIT	100	1 UNIT	0	0
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>PERSENTASE PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH</b>	90%	90%	90%	86%	100	-	-	-

PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH LAPORAN HASIL PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	70 LAPORAN	125 LHP	70 LHP	70 LHP	100	-	-	-
PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH LAPORAN HASIL PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	-	2 LAPORAN	70 LHP	70 LHP	100	-	-	-
PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH LAPORAN HASIL PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	-	15 LAPORAN	70 LHP	70 LHP	100	-	-	-
PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH LAPORAN HASIL PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	-	50 LAPORAN	70 LHP	70 LHP	100	115 LAPORAN	70 LAPORAN	60,86
PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH LAPORAN HASIL PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	-	-	-	-	-	83 LAPORAN	81 LAPORAN	97,59
PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH LAPORAN HASIL PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	-	-	70 LHP	70 LHP	100	-	-	-
PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH LAPORAN HASIL PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	-	1 LAPORAN	70 LHP	70 LHP	100	-	-	-
PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH LAPORAN HASIL PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	-	1 LAPORAN	70 LHP	70 LHP	100	-	-	-
PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH LAPORAN HASIL PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	-	8 LAPORAN	70 LHP	70 LHP	100	-	-	-
REVIU LAPORAN KINERJA	JUMLAH LAPORAN HASIL REVIU ATAS LAPORAN KINERJA PEMPROV SUMSEL	2 LAPORAN	1 LAPORAN	2 LAPORAN	2 LAPORAN	100	2 LAPORAN	2 LAPORAN	100

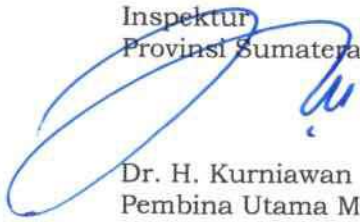
REVIU LAPORAN KEUANGAN	JUMLAH LAPORAN HASIL REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMPROV SUMSEL	1 LAPORAN	1 LAPORAN	1 LAPORAN	1 LAPORAN	100	1 LAPORAN	1 LAPORAN	100
PENGAWASAN UMUM DAN TEKNIS KABUPATEN/KOTA	JUMLAH LAPORAN HASIL PENGAWASAN UMUM DAN TEKNIS KABUPATEN/KOTA	-	-	45 LAPORAN	45 LAPORAN	100	-	-	-
PENGAWASAN UMUM DAN TEKNIS KABUPATEN/KOTA	JUMLAH LAPORAN HASIL PENGAWASAN UMUM DAN TEKNIS KABUPATEN/KOTA	-	17 LAPORAN	-	-	-	-	-	-
PENGAWASAN UMUM DAN TEKNIS KABUPATEN/KOTA	JUMLAH LAPORAN HASIL PENGAWASAN UMUM DAN TEKNIS KABUPATEN/KOTA	-	13 LAPORAN	-	-	-	50 LAPORAN	47 LAPORAN	94
MONITORING DAN EVALUASI TLHP BPK RI DAN TLHP APIP	JUMLAH LAPORAN MONEV TLHP BPK RI DAN APIP	5 DOKUMEN	2 DOKUMEN	5 DOKUMEN	5 DOKUMEN	100	4 DOKUMEN	4 DOKUMEN	100
PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	JUMLAH LAPORAN HASIL PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	85 LAPORAN	20 LAPORAN	85 LAPORAN	80 LAPORAN	100	85 DOKUMEN	84 DOKUMEN	100
PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	JUMLAH LAPORAN HASIL PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	-	4 LAPORAN	-	-	100	-	-	-
PENANGANAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH	JUMLAH LAPORAN HASIL PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	-	-	30 LAPORAN	30 LAPORAN	100	17 LAPORAN	14 LAPORAN	82,35
<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	PERSENTASE PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI YANG DILAKSANAKAN	90%	90%	90%	86%	-	-	-	-
PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN	JUMLAH DOKUMEN KEBIJAKAN TEKNIS BIDANG PENGAWASAN	3 DOKUMEN	2 DOKUMEN	3 DOKUMEN	3 DOKUMEN	100	2 REKOMENDASI	2 REKOMENDASI	100
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH LAPORAN HASIL PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1 LAPORAN	1 LAPORAN	30 LAPORAN	23 LAPORAN	76,67	39 PERANGKAT DAERAH	32 PERANGKAT DAERAH	82,05
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH LAPORAN HASIL PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1 LAPORAN	1 LAPORAN	-	-	-	-	-	-

PENDAMPINGAN, ASISTENSI, VERIFIKASI DAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI	JUMLAH LAPORAN HASIL PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI	3 PERANGKAT DAERAH	3 PERANGKAT DAERAH	40 LAPORAN	40 LAPORAN	100	41 PERANGKAT DAERAH	41 PERANGKAT DAERAH	100
PENDAMPINGAN, ASISTENSI, VERIFIKASI DAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI	JUMLAH LAPORAN HASIL PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI	1 LAPORAN	1 LAPORAN	-	-	-	-	-	-
KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI	JUMLAH LAPORAN KOORDINASI MONEV SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI	-	-	12 LAPORAN	12 LAPORAN	100	12 KEGIATAN	12 KEGIATAN	100
KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI	JUMLAH LAPORAN KOORDINASI MONEV SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI	12 LAPORAN	12 LAPORAN	-	-	100	-	-	-
KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI	JUMLAH LAPORAN KOORDINASI MONEV SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI	-	-	-	-	-	-	-	-
KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI	JUMLAH LAPORAN KOORDINASI MONEV SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI	-	1 LAPORAN	-	-	-	-	-	-
KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI	JUMLAH LAPORAN KOORDINASI MONEV SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI	-	1 LAPORAN	-	-	100	-	-	-

KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI	JUMLAH LAPORAN KOORDINASI MONEV SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI		1 LAPORAN	-	-	100	-	-	-
KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI	JUMLAH LAPORAN KOORDINASI MONEV SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI		1 LAPORAN	-	-	-	-	-	-
KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI	JUMLAH LAPORAN KOORDINASI MONEV SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI		3 LAPORAN	-	-	-	-	-	-
PENDAMPINGAN, ASISTENSI, DAN VERIFIKASI PENEGAKAN INTEGRITAS	JUMLAH LAPORAN PENDAMPINGAN, ASISTENSI DAN VERIFIKASI TERKAIT PENEGAKAN INTEGRITAS		2 OPD	5 LAPORAN	5 LAPORAN	100	5 PERANGKAT DAERAH	4 PERANGKAT DAERAH	80
PENDAMPINGAN, ASISTENSI, DAN VERIFIKASI PENEGAKAN INTEGRITAS	JUMLAH LAPORAN PENDAMPINGAN, ASISTENSI DAN VERIFIKASI TERKAIT PENEGAKAN INTEGRITAS		1 LAPORAN	-	-	-	-	-	-

Palembang, 2 September 2025

Inspektur  
Provinsi Sumatera Selatan,

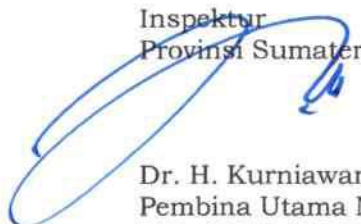
  
Dr. H. Kurniawan, AP., M.Si., CGCAE  
Pembina Utama Madya (IV.d)  
NIP. 197506171995011001

**TABEL 2.4**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

No	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI 2025	CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024		
1	Nilai Maturitas SPIP terintegrasi		✓	3	3	3	3,13	3,13	3,016	3,041	3,13	
2	Kapabilitas APIP		✓	3	3	3	3	3	3	3	3	

Palembang, **2** September 2025

Inspektur  
Provinsi Sumatera Selatan,

  
Dr. H. Kurniawan , AP., M.Si., CGCAE  
Pembina Utama Madya (IV.d)  
NIP. 197506171995011001

**TABEL 2.5**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026**  
**INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kegiatan				
	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026		
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.01	Inspektorat Daerah			100%	60.000.000.000				100%	60.000.000.000
A	6.01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	SUMSEL	100%	51.664.366.200	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	SUMSEL	100%	51.664.366.200
I	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	SUMSEL	4 Dokumen	50.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	SUMSEL	4 Dokumen	50.000.000
I	6.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	SUMSEL	6 dokumen		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	SUMSEL	6 dokumen	

2	6.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA - SKPD	SUMSEL	6 dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA - SKPD	SUMSEL	6 dokumen	
3	6.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA - SKPD	SUMSEL	6 dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA - SKPD	SUMSEL	6 dokumen	
4	6.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA - SKPD	SUMSEL	6 dokumen		Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA - SKPD	SUMSEL	6 dokumen	
5	6.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA - SKPD	SUMSEL	4 laporan		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA - SKPD	SUMSEL	4 laporan	
6	6.01.01.1.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja	SUMSEL	4 laporan	50.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja	SUMSEL	4 laporan	50.000.000
II	6.01.01.1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah</b>	SUMSEL	<b>95%</b>	37.734.234.420	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	<b>SUMSEL</b>	<b>95%</b>	37.734.234.420

1	6.01.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang dibayarkan gaji dan tunjangan	SUMSEL	1554 OB	36.569.833.570	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang dibayarkan gaji dan tunjangan	SUMSEL	1554 OB	36.569.833.570
2	6.01.01.1.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	SUMSEL	12 Dokumen	743.680.850	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	SUMSEL	12 Dokumen	743.680.850
3	6.01.01.1.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	SUMSEL	12 Dokumen	360.720.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	SUMSEL	12 Dokumen	360.720.000
4	6.01.01.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SUMSEL	1 Laporan	60.000.000	Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SUMSEL	1 Laporan	60.000.000
III	6.01.01.1.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>	SUMSEL	95%	20.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	SUMSEL	95%	20.000.000
1	6.01.01.1.03.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Tenaga penatausahaan BMD yang dibayar	SUMSEL	12 laporan	20.000.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Tenaga penatausahaan BMD yang dibayar	SUMSEL	12 laporan	20.000.000

<b>IV</b>	<b>6.01.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>SUMSEL</b>	<b>90%</b>	<b>2.483.674.300</b>	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	<b>SUMSEL</b>	<b>90%</b>	<b>2.483.674.300</b>
1	6.01.01.1.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan yang tersedia	SUMSEL	-	230.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan yang tersedia	SUMSEL	-	230.000.000
2	6.01.01.1.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan diklat	SUMSEL	96 orang	1.887.130.300	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan diklat	SUMSEL	96 orang	1.887.130.300
3	6.01.01.1.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi perundang undangan	SUMSEL	50 orang	366.544.000	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi perundang undangan	SUMSEL	50 orang	366.544.000
<b>V</b>	<b>6.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi umum yang tercapai</b>	<b>SUMSEL</b>	<b>90%</b>	<b>2.469.000.000</b>	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang tercapai	<b>SUMSEL</b>	<b>90%</b>	<b>2.469.000.000</b>
1	6.01.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi penerangan kantor yang disediakan	SUMSEL	3 paket	120.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi penerangan kantor yang disediakan	SUMSEL	3 paket	120.000.000

2	6.01.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket alat tulis kantor yang disediakan	SUMSEL	4 paket	220.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket alat tulis kantor yang disediakan	SUMSEL	4 paket	220.000.000
3	6.01.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	SUMSEL	3 paket	150.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	SUMSEL	3 paket	150.000.000
4	6.01.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	SUMSEL	4 paket	220.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	SUMSEL	4 paket	220.000.000
5	6.01.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	SUMSEL	21 Dokumen	35.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	SUMSEL	21 Dokumen	35.000.000
6	6.01.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SUMSEL	96 laporan	1.674.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SUMSEL	96 laporan	1.674.000.000
7	6.01.01.1.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	SUMSEL	2 dokumen	50.000.000	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	SUMSEL	2 dokumen	50.000.000
<b>VI</b>	<b>6.01.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pengadaan barang milik daerah yang tersedia</b>	<b>SUMSEL</b>	<b>95%</b>	<b>7.002.205.080</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pengadaan barang milik daerah yang tersedia</b>	<b>SUMSEL</b>	<b>95%</b>	<b>7.002.205.080</b>

1	6.01.01.1.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	SUMSEL	-	360.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	SUMSEL	-	360.000.000
2	6.01.01.1.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	SUMSEL	3 paket	1.500.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	SUMSEL	3 paket	1.500.000.000
3	6.01.01.1.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	SUMSEL	12 unit	2.142.205.080	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	SUMSEL	12 unit	2.142.205.080
4	6.01.01.2.07.09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	SUMSEL	1 unit	3.000.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	SUMSEL	1 unit	3.000.000.000
<b>VII</b>	<b>6.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase jasa penunjang yang tersedia</b>	<b>SUMSEL</b>	<b>95%</b>	<b>1.207.980.000</b>	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang tersedia	<b>SUMSEL</b>	<b>95%</b>	<b>1.207.980.000</b>
1	6.01.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	SUMSEL	12 laporan	14.520.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	SUMSEL	12 laporan	14.520.000
2	6.01.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SUMSEL	12 laporan	598.960.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SUMSEL	12 laporan	598.960.000

3	6.01.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum yang disediakan	SUMSEL	12 laporan	594.500.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum yang disediakan	SUMSEL	12 laporan	594.500.000
VIII	<b>6.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang milik daerah yang dipelihara</b>	<b>SUMSEL</b>	<b>95%</b>	<b>697.272.400</b>	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah yang dipelihara	<b>SUMSEL</b>	<b>95%</b>	<b>697.272.400</b>
1	6.01.01.1.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	SUMSEL	20 Unit	477.272.400	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	SUMSEL	20 Unit	477.272.400
2	6.01.01.1.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	SUMSEL	3 Unit	70.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	SUMSEL	3 Unit	70.000.000
3	6.01.01.1.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	SUMSEL	50 Unit	150.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	SUMSEL	50 Unit	150.000.000
4	6.01.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	SUMSEL	0 unit	0	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	SUMSEL	0 unit	0

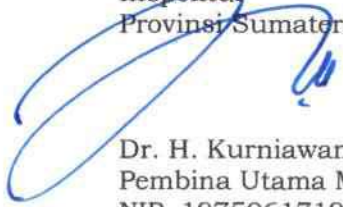
<b>B</b>	<b>6.01.02</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>Persentase penyelenggaraan pengawasan Pemerintah Daerah</b>	<b>SUMSEL</b>	<b>85%</b>	<b>6.536.229.800</b>	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelenggaraan pengawasan Pemerintah Daerah	<b>SUMSEL</b>	<b>85%</b>	<b>6.536.229.800</b>
<b>I</b>	<b>6.01.02.1.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Persentase penyelenggaraan pengawasan internal</b>	<b>SUMSEL</b>	<b>85%</b>	<b>4.298.960.800</b>	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal	<b>SUMSEL</b>	<b>85%</b>	<b>4.298.960.800</b>
1	6.01.02.1.01.01	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	SUMSEL	100 Laporan	892.421.000	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	SUMSEL	100 Laporan	892.421.000
2	6.01.02.1.01.02	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintahan daerah	SUMSEL	100 Laporan	1.223.838.000	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintahan daerah	SUMSEL	100 Laporan	1.223.838.000
3	6.01.02.1.01.03	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Kinerja	SUMSEL	2 Laporan	200.378.000	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Kinerja	SUMSEL	2 Laporan	200.378.000
4	6.01.02.1.01.04	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Keuangan	SUMSEL	1 Laporan	280.670.000	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Keuangan	SUMSEL	1 Laporan	280.670.000
5	6.01.02.1.01.05	Sub Kegiatan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan umum dan teknis Kabupaten/Kota	SUMSEL	45 laporan	1.279.878.800	Sub Kegiatan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan umum dan teknis Kabupaten/Kota	SUMSEL	45 laporan	1.279.878.800

6	6.01.02.1.01.07	Sub Kegiatan Monitoring dan evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	SUMSEL	6 dokumen	421.775.000	Sub Kegiatan Monitoring dan evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	SUMSEL	6 dokumen	421.775.000
II	6.01.02.1.02	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	SUMSEL	<b>100 laporan</b>	<b>2.237.269.000</b>	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	SUMSEL	<b>100 laporan</b>	<b>2.237.269.000</b>
1	6.01.02.1.02.01	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	SUMSEL	24 Laporan	135.000.000	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	SUMSEL	24 Laporan	135.000.000
1	6.01.02.1.02.02	Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	SUMSEL	140 laporan	2.102.269.000	Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	SUMSEL	140 laporan	2.102.269.000
C	6.01.03	<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi</b>	<b>Persentase pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan</b>	SUMSEL	<b>90%</b>	<b>1.799.404.000</b>	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	SUMSEL	<b>90%</b>	<b>1.799.404.000</b>
I	6.01.03.1.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>Persentase terlaksananya perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan</b>	SUMSEL	<b>90%</b>	<b>218.099.000</b>	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase terlaksananya perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan	SUMSEL	<b>90%</b>	<b>218.099.000</b>
1	6.01.03.1.01.01	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	SUMSEL	3 Rekomendasi	218.099.000	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	SUMSEL	3 Rekomendasi	218.099.000
II	6.01.03.1.02	<b>Pendampingan dan asistensi</b>	<b>Persentase terlaksananya pendampingan dan asistensi</b>	SUMSEL	<b>6 laporan</b>	<b>1.581.305.000</b>	Pendampingan dan asistensi	Persentase terlaksananya pendampingan dan asistensi	SUMSEL	<b>6 laporan</b>	<b>1.581.305.000</b>

1	6.01.03.1.02.01	Sub Kegiatan Pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	SUMSEL	41 Perangkat Daerah	490.341.500	Sub Kegiatan Pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	SUMSEL	41 Perangkat Daerah	490.341.500
2	6.01.03.1.02.02	Sub Kegiatan Pendampingan, asistensi, verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi	SUMSEL	41 Perangkat Daerah	558.261.500	Sub Kegiatan Pendampingan, asistensi, verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi	SUMSEL	41 Perangkat Daerah	558.261.500
3	6.01.03.1.02.03	Sub Kegiatan Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	SUMSEL	4 Kegiatan	208.578.000	Sub Kegiatan Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	SUMSEL	4 Kegiatan	208.578.000
4	6.01.03.1.02.04	Sub Kegiatan Pendampingan, asistensi, dan verifikasi Penegakan Integritas	Pendampingan, asistensi, dan verifikasi Penegakan Integritas	SUMSEL	4 Perangkat Daerah	324.124.000	Sub Kegiatan Pendampingan, asistensi, dan verifikasi Penegakan Integritas	Pendampingan, asistensi, dan verifikasi Penegakan Integritas	<b>SUMSEL</b>	4 Perangkat Daerah	324.124.000
			<b>Jumlah</b>			<b>60.000.000.000</b>					<b>60.000.000.000</b>

Palembang, 2 September 2025

Inspektur  
Provinsi Sumatera Selatan,

  
Dr. H. Kurniawan, AP., M.Si., CGCAE  
Pembina Utama Madya (IV.d)  
NIP. 197506171995011001

**TABEL 2.6**  
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2026**  
**INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Palembang, 2 September 2025

Inspektur  
Provinsi Sumatera Selatan,

Dr. H. Kurniawan , AP., M.Si., CGCAE  
Pembina Utama Madya (IV.d)  
NIP. 197506171995011001

**Tabel 4.1**  
**Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027**  
**Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan**

No	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
	6.01	Inspektorat Daerah			100,00	60.000.000.000			Inspektorat Daerah	100,00	80.522.735.172		PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik
A	6.01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	SUMSEL	100%	51.664.366.200	PAD		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	69.590.323.243	KPD: 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	
I	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	SUMSEL	4 Dokumen	50.000.000	PAD		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	6 Dokumen	1.200.000.000		

1	6.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	SUMSEL	6 dokumen		PAD		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	6 dokumen	150.000.000		
2	6.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA - SKPD	SUMSEL	6 dokumen		PAD		Jumlah dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA - SKPD	6 dokumen	150.000.000		
3	6.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA - SKPD	SUMSEL	6 dokumen		PAD		Jumlah dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA - SKPD	6 dokumen	200.000.000		
4	6.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA - SKPD	SUMSEL	6 dokumen		PAD		Jumlah dokumen DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA - SKPD	6 dokumen	200.000.000		
5	6.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA - SKPD	SUMSEL	4 laporan		PAD		Jumlah dokumen DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA - SKPD	4 laporan	200.000.000		
6	6.01.01.1.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja	SUMSEL	4 laporan	50.000.000	PAD		Jumlah laporan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja	4 laporan	200.000.000		
7	6.01.01.1.01.008	Sub Kegiatan Pengumpulan Data Statistik Sektor	Jumlah Data Statistik Sektor Daerah yang Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	SUMSEL	12 Data	0	PAD		Jumlah Data Statistik Sektor Daerah yang Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	12 Data	50.000.000		

8	6.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral	SUMSEL	1 Dokumen	0	PAD		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral	1 Dokumen	50.000.000		
<b>II</b>	<b>6.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>SUMSEL</b>	<b>95%</b>	<b>37.734.234.420</b>	<b>PAD</b>		<b>Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>95%</b>	<b>43.217.566.894</b>		
1	6.01.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang dibayarkan gaji dan tunjangan	SUMSEL	1554 OB	36.569.833.570	DAU		Jumlah orang yang dibayarkan gaji dan tunjangan	1970 OB	42.158.524.720		
2	6.01.01.1.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	SUMSEL	12 Dokumen	743.680.850	PAD		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	63.111.048		
3	6.01.01.1.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi i keuangan SKPD	SUMSEL	12 Dokumen	360.720.000	PAD		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi i keuangan SKPD	12 Dokumen	395.931.126		
4	6.01.01.1.02.0008	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut	SUMSEL					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut	6 Dokumen	200.000.000		
5	6.01.01.1.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	SUMSEL					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Dokumen	200.000.000		

6	6.01.01.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SUMSEL	1 Laporan	60.000.000	PAD		Jumlah Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	200.000.000		
III	6.01.01.1.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>	SUMSEL	95%	20.000.000	PAD		<b>Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>	95%	600.000.000		
1	6.01.01.1.03.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Tenaga penatausahaan BMD yang dibayar	SUMSEL	12 laporan	20.000.000	PAD		Jumlah Tenaga penatausahaan BMD yang dibayar	12 laporan	200.000.000		
2	6.01.01.1.03.01	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	SUMSEL	0	0	PAD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	200.000.000		
3	6.01.01.1.03.05	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	SUMSEL	0	0	PAD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	200.000.000		
IV	6.01.01.1.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	SUMSEL	90%	2.483.674.300	PAD		<b>Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	90%	3.390.927.560		
1	6.01.01.1.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan yang tersedia	SUMSEL	-	230.000.000	PAD		Jumlah paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan yang tersedia	1 Unit	241.500.000		

2	6.01.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	SUMSEL	0	0	PAD		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	150.000.000		
3	6.01.01.1.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan diklat	SUMSEL	123 orang	1.887.130.300	PAD		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan diklat	285 orang	2.264.556.360		
4	6.01.01.1.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	SUMSEL	0	0	PAD		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	95 orang	350.000.000		
5	6.01.01.1.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi perundang undangan	SUMSEL	50 orang	366.544.000	PAD		Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi perundang undangan	50 orang	384.871.200		
<b>V</b>	<b>6.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi umum yang tercapai</b>	SUMSEL	<b>90%</b>	<b>2.469.000.000</b>	<b>PAD</b>		<b>Persentase administrasi umum yang tercapai</b>	<b>90%</b>	<b>4.621.250.000</b>		
1		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	SUMSEL	0	0	PAD		Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	200.000.000		
2	6.01.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi penerangan kantor yang disediakan	SUMSEL	3 paket	120.000.000	PAD		Jumlah paket komponen instalasi penerangan kantor yang disediakan	3 paket	250.000.000		
3	6.01.01.1.06.07	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	SUMSEL		0	PAD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	200.000.000		

4	6.01.01.1.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	SUMSEL		0	PAD		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		200.000.000		
5	6.01.01.1.06.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	SUMSEL		0	PAD		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		300.000.000		
6	6.01.01.1.06.010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	SUMSEL		0	PAD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		200.000.000		
7	6.01.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket alat tulis kantor yang disediakan	SUMSEL	4 paket	220.000.000	PAD		Jumlah paket alat tulis kantor yang disediakan	4 paket	200.000.000		
8	6.01.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	SUMSEL	3 paket	150.000.000	PAD		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 paket	157.500.000		
9	6.01.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	SUMSEL	4 paket	220.000.000	PAD		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	300.000.000		
10	6.01.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	SUMSEL	21 Dokumen	35.000.000	PAD		Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	21 Dokumen	36.750.000		
11	6.01.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SUMSEL	96 laporan	1.674.000.000	PAD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96 laporan	2.577.000.000		

12	6.01.01.1.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	SUMSEL	2 dokumen	50.000.000	PAD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dokumen	200.000.000		
<b>VI</b>	<b>6.01.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pengadaan barang milik daerah yang tersedia</b>	<b>SUMSEL</b>	<b>95%</b>	<b>7.002.205.080</b>	<b>PAD</b>		<b>Persentase pengadaan barang milik daerah yang tersedia</b>	<b>95%</b>	<b>13.757.445.789</b>		
1	6.01.01.1.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	SUMSEL	3 Unit	360.000.000	PAD		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	2.500.000.000		
2	6.01.01.1.07.07	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	SUMSEL	0	0	PAD		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.000.000.000		
3	6.01.01.1.07.08	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	SUMSEL	0	0	PAD		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	200.000.000		
4	6.01.01.1.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	SUMSEL	0	0	PAD		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	350.000.000		
5	6.01.01.1.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	SUMSEL	0	0	PAD		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	350.000.000		

6	6.01.01.1.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	SUMSEL	3 paket	1.500.000.000	PAD		Jumlah paket mebel yang disediakan	3 paket	1.216.930.455		
7	6.01.01.1.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	SUMSEL	12 unit	2.142.205.080	PAD		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	12 unit	1.140.515.334		
8	6.01.01.2.07.09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	SUMSEL	1 unit	3.000.000.000	PAD		Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	6.000.000.000		
<b>VII</b>	<b>6.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase jasa penunjang yang tersedia</b>	<b>SUMSEL</b>	<b>95%</b>	<b>1.207.980.000</b>	<b>PAD</b>		<b>Persentase jasa penunjang yang tersedia</b>	<b>95%</b>	<b>1.353.133.000</b>		
1	6.01.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	SUMSEL	12 laporan	14.520.000	PAD		Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	100.000.000		
2	6.01.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SUMSEL	12 laporan	598.960.000	PAD		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	628.908.000		
3	6.01.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum yang disediakan	SUMSEL	12 laporan	594.500.000	PAD		Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum yang disediakan	12 laporan	624.225.000		
<b>VII I</b>	<b>6.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang milik daerah yang dipelihara</b>	<b>SUMSEL</b>	<b>95%</b>	<b>697.272.400</b>	<b>PAD</b>		<b>Persentase Barang milik daerah yang dipelihara</b>	<b>95%</b>	<b>1.450.000.000</b>		

1	6.01.01.1.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	SUMSEL	20 Unit	477.272.400	PAD		Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	20 Unit	500.000.000		
2	6.01.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	SUMSEL	0	0	PAD		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	300.000.000		
3	6.01.01.1.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	SUMSEL	3 Unit	70.000.000	PAD		Jumlah mebel yang dipelihara	3 Unit	150.000.000		
4	6.01.01.1.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	SUMSEL	50 Unit	150.000.000	PAD		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 Unit	200.000.000		
5	6.01.01.1.09.07	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	SUMSEL	0	0	PAD		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	100.000.000		
6	6.01.01.1.09.010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	SUMSEL	0	0	PAD		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000		
7	6.01.01.1.09.011	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	SUMSEL	0	0	PAD		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000		

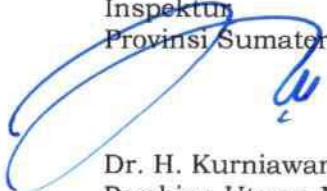
8	6.01.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	SUMSEL	0 unit	0	PAD		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0 unit	0		
<b>B</b>	<b>6.01.02</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>Persentase penyelenggaraan pengawasan Pemerintah Daerah</b>	<b>SUMSEL</b>	<b>85%</b>	<b>6.536.229.800</b>	<b>PAD</b>		<b>Persentase penyelenggaraan pengawasan Pemerintah Daerah</b>	<b>85%</b>	<b>8.193.407.979</b>		
<b>I</b>	<b>6.01.02.1.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Persentase penyelenggaraan pengawasan internal</b>	<b>SUMSEL</b>	<b>85%</b>	<b>4.298.960.800</b>	<b>PAD</b>		<b>Persentase penyelenggaraan pengawasan internal</b>	<b>85%</b>	<b>6.256.795.950</b>		
1	6.01.02.1.01.01	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	SUMSEL	100 Laporan	892.421.000	PAD		Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	100 Laporan	1.285.029.900		
2	6.01.02.1.01.02	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintahan daerah	SUMSEL	100 Laporan	1.223.838.000	PAD		Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintahan daerah	100 Laporan	1.285.029.900		
3	6.01.02.1.01.03	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Kinerja	SUMSEL	2 Laporan	200.378.000	PAD		Jumlah laporan hasil reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	350.000.000		
4	6.01.02.1.01.04	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Keuangan	SUMSEL	1 Laporan	280.670.000	PAD		Jumlah laporan hasil reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	350.000.000		
5	6.01.02.1.01.05	Sub Kegiatan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan umum dan teknis Kabupaten/Kota	SUMSEL	45 laporan	1.279.878.800	PAD		Jumlah laporan hasil pengawasan umum dan teknis Kabupaten/Kota	45 laporan	2.343.872.400		
6	6.01.02.1.01.06	Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	SUMSEL	0	0	PAD		Jumlah laporan hasil pengawasan umum dan teknis Kabupaten/Kota	0	200.000.000		
7	6.01.02.1.01.07	Sub Kegiatan Monitoring dan evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	SUMSEL	6 dokumen	421.775.000	PAD		Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	6 dokumen	442.863.750		

II	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	SUMSEL	100 laporan	2.237.269.000	PAD		Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100 laporan	1.936.612.029		
1	6.01.02.1.02.01	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	SUMSEL	24 Laporan	135.000.000	PAD		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	24 Laporan	241.750.000		
2	6.01.02.1.02.02	Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	SUMSEL	140 laporan	2.102.269.000	PAD		jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	140 laporan	1.694.862.029		
II	6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	SUMSEL	90%	1.799.404.000	PAD		Persentase pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	90%	2.739.003.950		
I	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase terlaksananya perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan	SUMSEL	90%	218.099.000	PAD		Persentase terlaksananya perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan	90%	529.003.950		
1	6.01.03.1.01.02	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	SUMSEL	0%	0	PAD		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	300.000.000		
2	6.01.03.1.01.01	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	SUMSEL	3 Rekomendasi	218.099.000	PAD		Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	3 Rekomendasi	229.003.950		
II	6.01.03.1.02	Pendampingan dan asistensi	Persentase terlaksananya pendampingan dan asistensi	SUMSEL	6 laporan	1.581.305.000	PAD		Persentase terlaksananya pendampingan dan asistensi	6 laporan	2.210.000.000		

1	6.01.03.1.02.01	Sub Kegiatan Pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	SUMSEL	41 Perangkat Daerah	490.341.500	PAD		Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	41 Perangkat Daerah	750.000.000		
2	6.01.03.1.02.02	Sub Kegiatan Pendampingan, asistensi, verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi	SUMSEL	41 Perangkat Daerah	558.261.500	PAD		Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi	41 Perangkat Daerah	750.000.000		
3	6.01.03.1.02.03	Sub Kegiatan Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	SUMSEL	4 Kegiatan	208.578.000	PAD		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	350.000.000		
4	6.01.03.1.02.04	Sub Kegiatan Pendampingan, asistensi, dan verifikasi Penegakan Integritas	Pendampingan, asistensi, dan verifikasi Penegakan Integritas	SUMSEL	4 Perangkat Daerah	324.124.000	PAD		Pendampingan, asistensi, dan verifikasi Penegakan Integritas	4 Perangkat Daerah	360.000.000		
			<b>Jumlah</b>			<b>60.000.000.000</b>			<b>Jumlah</b>		<b>80.522.735.172</b>		

Palembang, 2 September 2025

Inspektur  
Provinsi Sumatera Selatan,

  
Dr. H. Kurniawan, AP., M.Si., CGCAE  
Pembina Utama Madya (IV.d)  
NIP. 197506171995011001